

**BUTIR-BUTIR PENGARAHAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PERHUBUNGAN DARAT
YOGYAKARTA, 6 – 8 NOVEMBER 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia,

Yth. Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta

Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang saya hormati,

Para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

1. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat Tahun 2012.
2. Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2012 memiliki makna yang cukup strategis sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembangunan sub sektor perhubungan darat guna meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Rakornis ini bukan saja ajang untuk mempererat silaturahmi sesama insan perhubungan namun juga harus dapat dimanfaatkan untuk saling tukar pikiran dan menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide dan inovasi dalam menghadapi perkembangan dan tantangan tugas yang semakin kompleks serta perubahan lingkungan strategis yang harus kita antisipasi bersama. Dengan Rakornis ini diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan yang strategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi, baik pada tataran kebijakan maupun pada tataran operasional di lapangan.

3. Tema Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2012 kali ini yaitu **"KONSOLIDASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM RANGKA MENJAWAB TANTANGAN STRATEGIS DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT"**, mencerminkan sikap dan semangat bagi kita untuk senantiasa cerdas dan tanggap dalam melakukan pembenahan dan penyempurnaan, yang sejalan dengan modernisasi pembangunan di segala bidang, termasuk penyelenggaraan transportasi sebagai salah satu moda transportasi dalam mendukung pembangunan nasional.
4. Komitmen pelaksanaan tugas yang tinggi dan kebersamaan yang kuat antar insan perhubungan diperlukan untuk memenuhi tuntutan paradigma baru dalam penyelenggaraan transportasi darat, demi tercapainya tujuan berupa peningkatan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat.
5. Isu strategis yang meliputi peningkatan keselamatan transportasi darat, upaya peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peningkatan pelayanan angkutan umum di perkotaan dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan adalah sebagian dari sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, melalui diskusi dalam forum ini diharapkan dapat diperoleh masukan, tanggapan dan juga inovasi yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan transportasi seiring dengan perkembangan dan modernisasi pembangunan yang menuntut pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat.
6. Pada tahun 2013 yang akan datang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang Keselamatan Transportasi Darat, dimana mulai tahun depan Pemerintah Daerah Provinsi mendapat alokasi

DAK untuk Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ. Pemerintah Kabupaten/Kota selain tetap untuk pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ juga dapat digunakan untuk pengadaan, peningkatan atau perawatan peralatan atau fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor. Untuk itu saya mengharapkan kegiatan DAK tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan dimana mengatur penggunaan DAK, pelaksanaan dan pelaporannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi perlu saya sampaikan untuk pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat perlu disusun pelaporannya yang nanti akan berpengaruh terhadap alokasi DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat pada waktu yang akan datang.

7. Sesuai arahan Wakil Presiden RI tanggal 1 November 2011 perihal Rencana Aksi Gerakan Nasional Indonesia Bersih, Asri, Indah (BERSERI), Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan rencana aksi kebersihan di terminal dan pelabuhan penyeberangan secara bertahap. Rencana aksi diawali dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor : HK.209/I/2DRJD/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Kebersihan Lingkungan Kerja Sarana dan Prasarana Transportasi Darat yang disampaikan kepada seluruh Dinas Pehubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pada tahun 2012 untuk mewujudkan Program Gerakan Nasional Indonesia BERSERI telah ditetapkan 10 (sepuluh) terminal penumpang dan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan sebagai uji coba terciptanya peningkatan kebersihan. Lokasi terminal antara lain : Purabaya, Tasikmalaya, Arjosari Malang, Leuwipanjang Bandung, Tirtonadi Solo, Kalideres Jakarta, Purwokerto Banyumas, Lebak Bulus Jakarta, Giwangan Yogyakarta dan Cilegon Banten. Untuk lokasi pelabuhan penyeberangan, antara lain : Muntok Palembang, Ketapang Jawa Timur, Gilimanuk Bali, Padang Bai Bali, Lembar NTB,

Merak Banten, Bakauheni Lampung. Program Gerakan Indonesia BERSERI ini masuk dalam kegiatan yang dipantau langsung oleh UKP4 dan secara langsung dilaporkan kepada Presiden RI. Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kebersihan untuk pelayanan umum kepada masyarakat.

8. Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengandung adanya suatu paradigma baru yang harus disertai dengan perubahan *mind set*, penyamaan persepsi dan interpretasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam tataran implementasi Undang-Undang tersebut terdapat tantangan besar dan tugas-tugas penting yang akan kita hadapi.

Jabaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 telah diterbitkan beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain : PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, PP Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PP yang baru terbit pada tahun ini adalah PP Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan sedangkan untuk PP yang lainnya sedang dalam proses harmonisasi.

9. Pencanaan Dekade Aksi Keselamatan Jalan Nasional oleh Wakil Presiden RI pada 20 Juni 2011 merupakan salah satu upaya menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan jalan dalam rangka mewujudkan *Road Map to Zero Accident*. Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan

Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) yang meliputi : penyusunan program nasional kegiatan LLAJ, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan LLAJ, pengkaji masalah keselamatan LLAJ dan Manajemen Keselamatan LLAJ. Misi RUNK LLAJ ini adalah mengarusutamakan keselamatan jalan menjadi prioritas nasional, membudayakan penyelenggaraan lalu lintas jalan yang mengutamakan keselamatan dan mensinergikan segala potensi guna memaksimalkan kinerja keselamatan jalan. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ perlu mendapat perhatian dari seluruh peserta Rakornis untuk melihat secara perspektif terhadap hal-hal yang secara bersama-sama perlu untuk dipersiapkan dan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan jalan.

10. Angkutan penyeberangan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Angkutan penyeberangan berperan sebagai sub sistem transportasi darat dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya (*promoting and servicing sector*) serta berfungsi *multiplier effect* dan mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. Pola pembangunan infrastruktur yang relatif murah, terintegrasi dengan jaringan jalan raya dan kereta api, pelayanan yang reguler dengan frekuensi yang tetap, upaya subsidi yang berkesinambungan dan menjangkau wilayah yang relatif terpencil menjadikan keunggulan ini dirasakan secara signifikan oleh masyarakat pengguna. Peran strategis ini perlu dipertahankan mengingat penyeberangan merupakan jembatan bergerak bagi moda transportasi darat lainnya.

11. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama, akhirnya saya sampaikan harapan agar Rapat Koordinasi Teknis bidang transportasi darat kali ini dapat kita manfaatkan untuk saling memberi dan memperkuat jalinan kerjasama dan koordinasi diantara kita, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat bagi kita semua, Amin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SUROYO ALIMOESO